

Masa Depan Indonesia yang Mencemaskan Perspektif Sosiologis

Sobirin Malian

The condition of our society today seems to be overwhelmed by social turbulence, the randomness and irregularity, the absurd political discourse, radical fluctuation of economic sectors, never ending social violence, and uncertainty of cultural values. The suggestions made by the writer are: first, the symbols shift, means the politic of information system must aimed to create productivity and creativity for further society development. Second, normative reformation, means, transparency of court system, legal certainty, and excludes the legal procedure away from political interest.

MELEDAKNYA bom di Legian, Bali malam 12 Oktober lalu berdamak cukup hebat. Penulis melihat masa depan Indonesia semakin suram pasca kejadian itu, tanda-tanda kebangkitan ekonomi secara spesifik menjadi musnah, sementara PR yang lain masih berjalan di tempat (involutif). Bahkan secara umum bisa dikatakan masa depan Indonesia sangat mencemaskan. Tulisan berikut bermaksud mengkritisi apakah kita masih memiliki rasa optimisme yang cukup menghadapi itu semua?

Kondisi

Begitu diproklamirkan 17 Agustus 1945 pada dasarnya kita ingin memulai

segalanya secara ideal sebagai bangsa yang bersatu tetapi plural. Bung Karno dalam sebuah pidato dengan optimis mengatakan, "negara kita Republik Indonesia akan hidup kekal abadi." Apa yang dikatakan Bung Karno memang nampak heroik, dan tentu tidak pernah terbayangkan kalau Indonesia akan seperti saat ini.

Bom di Legian, Bali sebenarnya hanya momentum tambahan yang semakin menguatkan betapa sulitnya untuk keluar dari multi krisis saat ini. Sebelum terjadi bom sebenarnya dirasakan berbagai bentuk ketidakberaturan, keacakan (*randomnes*), dan ketidakpastian yang mewarnai berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa akhir-akhir ini.

Kondisi bangsa ini seakan dipenuhi

semacam gerak turbulensi sosial (*social turbulence*) yang tidak beraturan dan acak: wacana politik yang berkembang *absurd* tak berarah ; wacana ekonomi yang dihantui fluktuasi kronis; wacana sosial yang ditandai kekerasan tanpa akhir; wacana budaya dibelenggu oleh ketidakpastian nilai.¹

Kondisi turbulensi, seperti dikatakan, Fachry Ali, akan menyebabkan proses demokratisasi berkembang ke arah yang "melampaui" alam demokrasi itu sendiri, yaitu demokrasi tanpa kendali *hyperdemocracy*.² Kondisi hiperdemokrasi, ironisnya telah menciptakan "zona-zona kemacetan" di hampir setiap sistem: kemacetan pada sistem ekonomi; kebuntuan pada sistem politik; kebingungan pada aspek etika budaya; kebimbangan pada sistem sosial dan hukum.³

Dibalik turbulensi itu seperti ada berbagai kekuatan penarik (seperti magnet) yang menarik elemen-elemen bangsa ini ke sana-ke mari dalam pola ketidakberaturan dan keacakan. Kekuatan penarik itu bersifat kontra-produktif, dan menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemacetan reformasi dan demokrasi. Kekuatan itu seperti kekuatan *status quo* di dalam

reformasi; kekuatan *micro-facism*, *chaos*, *anarchis* dan *hegemonik* pada teori Gramsci.⁴

Sebenarnya berkembangnya turbulensi, keacakan, ketidakberaturan (anomali) dalam masyarakat transisi adalah hal biasa dan tidak melulu negatif, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa Timur pasca runtuhnya tembok Berlin. Bahkan sebaliknya, tak jarang turbulensi dapat bernilai positif, bila mampu menggerakkan sistem-sistem demokratis ke arah sifat dinamis dan konsisten di dalam dirinya.

Namun, turbulensi menjadi sebuah ancaman serius bila kekacauan, keacakan, dan ketidakpastian itu berkembang ke arah lenyapnya kekuatan pengendalian (kontrol), ke arah kondisi hiper-demokrasi, yang akan menggiring sebuah sistem ke arah penghancuran di dalam dirinya. Itulah yang akhir-akhir ini melanda Indonesia yang membuat kita khawatir dan pesimis terhadap kondisi yang ada.

Sejarah

Tanpa bermaksud berpesimis ria, pengalaman berbagai negara yang kini telah meninggalkan sejarah pahit bagi bangsanya. Tahun 1961 Ortega Gasset pernah mengingatkan bangsa Spanyol bahwa negara mereka tidak ada lagi.⁵ Gasset kala itu mengingatkan bangsanya yang tengah mengalami turbulensi negatif. Andrei Amalrik (1969), sejarawan Soviet,

⁴Antonio Gramsci yang diurai secara kritis oleh Mansour Fakih dalam *Jalan Lain*, Insist dan Pustaka Pelajar, September 2002.

⁵Maksudnya bahwa bangsanya telah terkubur secara nilai budaya akibat kerasnya penetrasi budaya asing dan orang asing.

¹Yasraf Amir Piliang, *Kompas*, 15 Mei 2000.

²Demokrasi sendiri sebagai sebuah sistem politik sebenarnya telah banyak dipertanyakan sebagai sistem yang ideal diantaranya oleh Carol C.Gould melalui bukunya *Rethinking Democracy*, Cambridge: MIT Press, 1978.

³Dalam istilah Sally F.Moore adanya *semi autonomous field*, kebimbangan terhadap hukum terutama akibat adanya "permainan" dalam wilayah hukum yang menyebabkan kepastian hukum menjadi hilang.

menulis sebuah esai yang menelaah sebuah pertanyaan, apakah setelah tahun 1984 Uni Republik Soviet sosial yang dibentuk Lenin pada akhir tahun 1922 masih akan hidup?

Pada tahun 1918 Jerman berdiri sebagai negara baru, tetapi hanya dapat hidup sampai tahun 1933 setelah Hitler berkuasa. Yugoslavia yang dibangun dengan susah payah oleh Yosef Broz Tito terpecah belah oleh persoalan etnis dan agama. Berbagai negara lain di Asia juga mengalami gejolak yang sama seperti masyarakat Moro di Filipina, Indonesia yang telah melepas Timor-Timur, Myanmar, Vietnam dan lain-lain.

Dari uraian Andrei Almarik menunjukkan, negara sebesar Uni Soviet sekalipun dapat dipertanyakan eksistensinya dan terbukti tidak bertahan. Para futurolog, sejarawan dan sosiolog seperti Toffler, Naisbitt, Huntington⁶, Fukuyama⁷ masing-

masing pernah meramalkan bahwa pada akhirnya hampir tidak ada keabadian sebuah negara atau sebuah peradaban. Arnold Toynbee (1955) sejarawan besar Inggris, pernah meramalkan Amerika Serikat akan mengalami nasib sama dengan nasib Austro-Hongaria yang dibentuk tahun 1867 sebagai sebuah negara besar di Eropa yang tahun 1918 mengalami disintegrasi akibat revolusi perang Dunia I, dimana terjadi benturan kebudayaan dengan budaya Eropa Selatan. Hingga kini bukti-bukti sedang terjadi gejolak sosial budaya pada masyarakat pluralis masih berlangsung. Satu hal yang pasti, peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan gedung kembar WTC paling tidak menunjukkan hidupnya turbulensi negatif di Amerika, yang menyiratkan ketidaksenangan sejumlah kelompok terhadap negara adi daya itu. Dan riilnya saat ini masyarakat muslim sangat "tidak senang" dengan sepak terjang "seenaknya" yang dilakukan Amerika yang nyata-nyata mendeskreditkan umat Islam.

⁶Samuel P. Huntington, dalam bukunya *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, banyak mengulas akan terjadinya benturan antar peradaban termasuk Islam dan Barat. Qalam, Yogyakarta, 2001.

⁷Francis Fukuyama dalam karyanya *Our Posthuman Future, Qonsequences of the Biotechnology Revolution*, Farear, Straus and Giroux, New York, 2002. Dalam buku ini ia menguraikan bahwa ternyata hampir tidak ada sebuah peradabanpun dalam sejarah yang abadi, apalagi sebuah negara. Detailnya ia menguraikan bahwa terdapat fase-fase lahirnya sebuah negara hingga hancurnya sebuah negara. Mulai dari embrio lahirnya negara, perkembangan negara, point break (garis puncak negara) lalu kalau negara tak bertahan akan muncul fase disintegrasi negara yang kalau tak mampu dipotong akan muncul dis-solution yang tak lain kehancuran negara itu sendiri.

Universal

Seolah menjilat ludahnya sendiri, dalam sebuah pidato 1959 Bung Karno mengatakan: akhirnya negara kita akan menghilang (*will be withering away*).⁸ Saat itu tidak ada yang mengetahui teori Lenin tentang negara dan revolusi dalam bukunya *The State and Revolution* (1917) yang menghebohkan itu. Apa yang diutarakan

⁸Pernyataan Soekarno ini mirip dengan yang disampaikan Gasset, hanya saja Soekarno lebih menekankan pada perspektif resiko politik.

Bung Karno sebenarnya lebih merupakan ungkapan diplomatis guna menyenangkan pengikut komunis di Indonesia. Sesuai target Lenin, pada akhirnya tidak ada lagi negara Rusia tetapi yang ada hanya masyarakat komunis. Kini setelah 43 tahun, ucapan Bung Karno yang sekadar "membenarkan" Lenin perlahan-lahan muncul ke permukaan. Masyarakat Aceh, Ambon, Papua, Riau dan beberapa daerah lain mungkin menyusul ingin merdeka (*separates*). Berbagai gejolak sosial silih berganti dengan derajat dan intensitas yang terkadang sangat tinggi. Pertanyaan yang segera muncul, apakah Indonesia akan tetap bertahan sebagai negara kesatuan? Dalam kondisi yang masih galau seperti itu, muncul konsep otonomi daerah sebagai solusi untuk meredam disintegrasi bangsa. Pertanyaan berikutnya, benarkah otonomi daerah merupakan jawaban yang dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini.

Indonesia merupakan negara yang pluralis. Setiap masyarakat yang pluralis merupakan suatu masyarakat ideal. Masyarakat pluralis terbentuk berdasarkan modal demokrasi liberal klasik ciptaan John Stuart Mill dan John Richard Green yang dalam abad 19 masih dipandang sebagai suatu masyarakat ideal. Kini bagi kaum penganut teori empiris, model demokrasi liberal klasik yang didasarkan pada konsep Mill dan Green berkesimpulan, negara merupakan cermin sifat pokok manusia (*the essential nature of man*). Hal ini akan merujuk pada pendapat Jeremy Bentham dan Thomas Hobbes. Mengacu pada pandangan ini masyarakat dianggap sebagai bentuk persaingan secara bebas (*freely competitive market relation*). Bentham dan Hobbes menempat-

kan manusia sebagai titik sentral. Pada abad ke-20 Mill dan Green memandang manusia dari sudut moral yang makin tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Konsep Mill dan Green tidak sesuai dengan konsep humanisme yang makin memiliki kecenderungan yang kuat.

John Rawls (1971) seorang penganut teori Empiris terkemuka dengan karyanya *A Theory of Justice*⁹ dan Robert Nozick (1974) dengan karyanya *Anarchy, State and Utopis*¹⁰, mengecam demokrasi liberal klasik sebagai suatu masyarakat pluralis yang tidak sesuai dengan nilai humanisme. Namun, seperti dilihat C.B. Macpherson (1977) para penganut teori empiris akan berhenti di tengah jalan dengan teorinya tentang negara, karena akan membahayakan posisi mereka sebagai juru bicara demokrasi liberal klasik, mengingat model manusia dan masyarakat yang mereka ciptakan secara moral makin tidak disukai orang, sehingga kesimpulannya adalah penganut teori empiris tidak memerlukan teori tentang negara.

Namun, dalam kecaman-kecaman yang dilakukan hanya merupakan konsep teori keadilan pemerataan (*distribution justice*), yakni pembagian yang adil dari barang-barang primer atau teori kebebasan, yakni besaran dan macam kebebasan individu yang diperbolehkan dan secara moral dapat diinternalisasi. Para penganut teori empiris ada di persimpangan jalan. Di satu pihak mereka mengecam demokrasi liberal klasik dilihat dari sudut

⁹ John Rawl, 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.

¹⁰ Robert Nozick, 1974. *Anarchy, State and Utopis*, New York: Basic Books.

nilai humanisme, tetapi di lain pihak mereka tetap menjadi juru bicara masyarakat pluralis. Hal seperti itu tidak terjadi pada penganut teori empiris, mereka bersedia mengambil resiko untuk meninggalkan negara pluralis.

Kecaman-kecaman seperti dilancarkan Lenin terhadap demokrasi liberal klasik sebenarnya tidak asing bagi pengecam konsep yang sama. Bedanya, bila yang pertama bersedia meninggalkan masyarakat pluralis maka yang terakhir tetap konsisten menolak konsep kediktatoran. Bagi penganut empiris, jalan keluar yang menjebak kediktatoran akhirnya ditolak dan menerima atau mempertahankan eksistensi masyarakat pluralis. Bagi Lenin kediktatoran kaum proletar hanya bersifat sementara, karena hanya merupakan salah satu tahap dalam proses peralihan masyarakat komunis. Berbeda dengan kediktatoran yang ada pada masyarakat kapitalis yang berakhir jika masyarakat kapitalis itu berakhir.

Kasus Indonesia

Sejak negara Indonesia merdeka, kita boleh dibalang tidak memiliki pemikir-pemikir yang menciptakan teori tentang negara. Oleh karena itu, kebanyakan kita lebih percaya mitos bahwa bahaya atas ancaman komunis akan dapat ditangkis jika tidak berhasil menciptakan kesuksesan dalam bidang pembangunan ekonomi. Alexis de Tocqueville (1955) mantan menteri luar negeri Perancis menyatakan, revolusi Perancis tahun 1789 justru timbul saat pemerintah Louis XVI berhasil menciptakan suatu sukses dalam pembangunan ekonomi. Kemakmuran terus bertambah besar, tetapi jauh dari menenangkan penduduk dan di mana-mana menunjuk-

kan adanya semacam "ancaman" oleh pemerintah demi pembangunan. Hal yang kurang lebih sama dialami Indonesia di masa Orde Baru.

Di sinilah kita perlu mempelajari perkembangan dalam masyarakat-masyarakat pluralis di berbagai negara, dan dapat melihat lebih jelas kegagalan-kegagalan politik modernisasi di Asia seperti Pakistan, Indonesia atau Iran. Sisi positif, hal ini merupakan *blessing in disguise* lantaran tidak mencapai sukses politik modernisasi. Namun, jika ingin survive sebagai bangsa, maka para (elit) pemikir bangsa ini harus lebih teliti mempelajari mengapa sampai terjadi berbagai pemberontakan, destabilisasi di berbagai negara dalam sejarah dunia.

Dalam konteks Indonesia, kita telah mengalami adanya pemberontakan Permesta, RMS, Gerakan Papua, GAM, Riau Merdeka dan lain-lain. Semua gerakan itu mengarah pada disintegrasi bangsa. Persoalan prinsip yang mendasari gerakan itu berbeda-beda; ada yang dilatarbelakangi ketidakadilan secara sosial ekonomi, ada yang dilatarbelakangi agama, ada yang dilatarbelakangi politik. Hingga kini gerakan-gerakan itu belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Juga berbagai gejolak di Poso, Mataram, Maluku Utara belum mendapat solusi yang tepat. Tampaknya sifat egalitarian masyarakat Indonesia yang terkenal humanis, mulai terkoyak-koyak hanya karena memperjuangkan atribut/symbol kedaerahan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sekali lagi belum memberi solusi yang memuaskan.

Paradigma Baru

Dari uraian panjang lebar itu, perlu

pendekatan baru (paradigma baru) atau meminjam istilah Mansour Fakih¹¹, diperlukan "jalan lain" untuk memperbaiki kondisi Indonesia. Secara teoritis kekuatan paradigma baru ini terletak pada kemampuannya membentuk apa yang ingin dilihat, apa yang dianggap masalah, apa masalah yang dirasa bermanfaat untuk dipecahkan, serta apa metode yang digunakan dalam meneliti dan berbuat. Paradigma sebaliknya mempengaruhi apa yang tidak dipilih, tidak ingin dilihat, dan tidak ingin diketahui.

Hazel Henderson¹², menggambarkan semacam "zone peralihan" dalam sistem-sistem (ekonomi, politik, sosial) yang tengah mengalami proses transformasi. Zone transisi ini dicirikan oleh adanya kondisi "peregangan" (*filbrillation*) di dalamnya: seperti otot jantung manusia yang mengalami kekejangan tiba-tiba, yang menggiring pada dua kemungkinan: kematian atau kembali ke keadaan normal. Zone peregangan ini ditandai munculnya ketidakpastian dan resiko yang amat besar. Zone itu adalah zone kritis (*critical zone*), yang di dalam teori chaos disebut zone bifurkasi (*bifurcation*), yaitu zona perubahan yang didalamnya tumbuh banyak mode dan percabangan, yang akan menentukan arah perubahan.

Banyak model perubahan dinamis seperti ini yang telah dikembangkan, seperti model *catastrophe* (Rene Thom), model "keberaturan lewat fluktuasi" (Ilya Prigogine), dan model "perubahan melalui

traktor" (Ralps Abraham). Di dalam model-model dinamis ini, perubahan tampak seperti tak teramalkan (*unpredictable*); ketidakpastian ada di mana-mana; tersedia banyak pilihan untuk mengganti sistem; terdapat banyak lahan untuk rekonseptualisasi, redesain, dan restrukturisasi.

Namun, yang penting dalam model perubahan dinamis (politik, sosial, ekonomi) ini adalah menemukan peluang perubahan. Menemukan keberaturan dalam skala lebih besar. Sehingga, meski pada tingkat bagian-bagian yang tampak hanya ketidakberaturan dan keacakan dinamis, tetapi pada tingkat keseluruhan yang lebih besar (*wholeness*: negara, bangsa) dinamika itu dapat membawa kemajuan dan perubahan positif (*the positive chaos*).

Saat ini Indonesia tengah dilanda turbulensi seperti yang telah disinggung di atas. "Turbulensi" (sosial) adalah sebuah keadaan yang ditandai oleh ketidakstabilan (*disorder*) dan keacakan (*randomness*) pergerakan (sosial) di dalam setiap skalanya. Turbulensi, menarik komponen-komponen sosial (massa, mahasiswa, konstituen) yang dipengaruhinya ke arah tertentu dan kemudian melepaskannya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan guncangan sosial. Turbulensi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Tetapi, turbulensi yang "melampaui kendali" akan menggiring ke arah hiperdemokrasi.

Turbulensi menurut Michel Seres, di dalam *Genesis* (1995) adalah sebuah "keadaan antara", sebuah "perbatasan": antara keadaan kacau dan teratur, antara kepastian dan ketidakpastian, antara dapat diperkirakan dengan tidak, inilah warna proses demokratisasi akhir-akhir ini. Berikut ciri turbulensi yang terjadi di negara kita itu:

¹¹Mansour Fakih, 2002. *Jalan Lain*, Insist dan Pustaka Pelajar.

¹²Hazel Henderson, 1991. *Paradigma in Progress: Life Beyond Economics*.

Turbulensi politik adalah keadaan silang-menyilangnya berbagai kekuatan dan kepentingan politik, yang satu sama lain saling tarik-menarik dengan sangat kuat dan keras kepala, dalam rangka mendapatkan, mempertahankan, atau menggoyahkan kekuasaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kebuntuan politik. Sebagai contoh kasus dana Bulognya Akbar Tanjung, Ketua Kejaung, MA Rahman dan kasus suap di DPR.

Turbulensi hukum adalah keadaan ketika wacana hukum dipertainkan tempo, irama, dan gayanya oleh berbagai kekuatan tak tampak (*absurd*) yang berpengaruh sehingga pada suatu ketika hukum seakan-akan tampak serius menegakkan keadilan, tetapi tiba-tiba berubah bentuk ke arah hipokrisi (pemalsuan) kebenaran (*simulacrum of justice*).¹³

Turbulensi massa adalah keadaan ketika berbagai kekuatan massa ditarik ke sana ke mari oleh berbagai kekuatan *vested interest* yang berpengaruh, untuk kepentingan politik dan kekuasaan jangka pendek, kepentingan penciptaan opini politik, atau kepentingan menjatuhkan kredibilitas (pembunuhan karakter).

Turbulensi moneter adalah kondisi ketika nilai mata uang berfluktuasi tak terkendali, yang disebabkan adanya berbagai kekuatan penarik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, berupa kondisi politik yang kacau, kondisi keamanan yang tak terkendali dan kondisi sosial yang rawan,

yang menyebabkan kekacauan di sektor riil.

Turbulensi ideologi adalah keadaan tarik-menarik yang amat kuat dan acak diantara berbagai kekuatan ideologis, untuk memperebutkan hegemoni dan pengaruh dalam sebuah sistem politik yang sangat terbuka dewasa ini, termasuk di antaranya kekuatan daerah, suku, agama, dan sebagainya.

Turbulensi kultural adalah ketika berbagai elemen kultural, seperti informasi, nilai tanda dan makna berkembang dan membiak di dalam pola-pola kekacauan dan keacakan, sehingga di dalamnya sangat sulit mendapatkan kebenaran, informasi berubah menjadi disinformasi, media menjelma menjadi *simulacrum*, kebenaran berubah menjadi sebuah "retorika" dan *lips service*.

Di Titik yang Mencemaskan

Memasuki tahun kelima era reformasi, perkembangan sosial justru memperlihatkan berbagai bentuk turbulensi (sosial, ekonomi, politik, kultural) yang sangat mencemaskan. Kondisi sosial politik secara umum menunjukkan telah tercipta sebuah kondisi hiper-demokrasi, yang menggiring bangsa ini ke arah sebuah momentum perkembangan yang negatif, yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai keadaan titik "*moment inersia*".

Moment inersia adalah sebuah kondisi involutif atau berjalan di tempat, di mana sesuatu (benda, manusia, masyarakat atau bangsa) mengeluarkan setiap enerjinya untuk menahan berbagai kekuatan dan gaya yang mendatangi dari luar dirinya. Misalnya, seseorang yang mengeluarkan gaya moment inersianya untuk

¹³Dalam konteks sosiologis karya Stewart Macaulay. *An Empirical View of Contract Consin Law Review*, 1983 cukup banyak dikutip untuk menunjukkan betapa banyak perbedaan antara hukum dalam teks dengan perilakunya di lapangan.

bertahan dan tidak hanyut dibawa arus sungai yang deras.

Inilah analogi dari komponen bangsa Indonesia, yang menguras seluruh energi untuk "menahan" berbagai bentuk tekanan sosial yang datang: kegalauan politik, konflik antar suku dan permusuhan sosial, kriminalitas, separatisme, yang memerangkap mereka dalam zona-zona kemacetan, sehingga tidak tersisa lagi energi untuk memikirkan masa depan bangsa.¹⁴

Bila bangsa ini ingin melepaskan diri dari zona-zona "turbulensi dalam kemacetan", maka energi turbulensi harus dialihkan dari yang bersifat dekonstruktif, merusak dan destruktif ke arah yang bersifat rekonstruktif, produktif, dan kreatif-inovatif.

Zona turbulensi harus diubah menjadi zona-zona "turbulensi dalam terobosan" (*breakthrough zone*), yaitu sebuah zona yang di dalamnya turbulensi dianggap sebagai sebuah peluang perubahan, penguatan etos kerja, penumbuhan daya kreativitas; sebuah cara pemberdayaan, pembelajaran, pengorganisasian, dan pemerintahan.

Untuk mengubah energi turbulensi negatif menjadi positif sebagai sebuah terobosan diperlukan kemampuan penyesuaian diri (*adaptability*), kelenturan (*flexibility*), inklusivitas dan keterbukaan (*openness*) yang tinggi pada setiap komponen bangsa, dalam menuju masa depan bersama yang demokratis dan berkepastian. Untuk itu, sekali lagi jelas diperlukan berbagai perubahan.

Solusi

Yang harus dilakukan untuk mengubah energi turbulensi negatif ke arah turbulensi positif; *pertama*, perubahan pada tingkat simbolik. Turbulensi simbolik yang negatif berupa kesimpangsiuran informasi, distorsi data, dis-informasi, dramatisasi simbolik yang tidak produktif bahkan kontra produktif di berbagai media harus dihentikan. "Politik informasi" harus diarahkan untuk menghasilkan informasi yang produktif, konstruktif, dan kreatif bagi perubahan masa depan yang positif.

Kedua, perubahan pada tingkat normatif. Turbulensi norma dan hukum, berupa pemutarbalikkan fakta, pengadilan "pura-pura", terdakwa palsu, *simucrum* keadilan, permainan citra kebenaran (*game of image*), kebenaran semu, hipokrisi, juga harus dihentikan. Batas abu-abu antara ketegasan hukum dan kehampaan hukum, antara keseriusan hukum dan kepura-puraan hukum harus dihilangkan. Memang dalam konteks Indonesia seperti banyak disinyalir para pakar hukum -aspek hukum seringkali terkait erat dengan politik, bahkan tak jarang politik "mempermainkan" hukum. Asumsi teoritisnya bahwa hukum adalah produk politik.¹⁵

Ketiga, perubahan pada tingkat wacana politik, komunikasi politik dan interaksi sosial-politik, yang menyebabkan tersumbatnya saluran komunikasi di antara unsur-unsur pemerintah (DPR, MPR, Presiden) dan masyarakat harus diarahkan pada bentuk wacana yang lebih dinamis-konstruktif. Harus diciptakan *language game* baru yang dapat menciptakan efek

¹⁴Dalam catatan Ahmad Syafii Maarif memang sangat sedikit para elit negara yang benar-benar memikirkan masa depan bangsa ke depan, yang banyak mereka yang berpikir jangka pendek dan syarat kepentingan.

¹⁵Moh. Mahfud MD, 1999. Politik Hukum di Indonesia, LP3ES dan UII Press.

sinergi baru dalam sistem-sistem demokratis.

Keempat, perubahan pada tingkat kultural. Sikap budaya yang berpusat pada ego (*ego-centrism*) harus diambil alih oleh sikap yang mementingkan masyarakat secara luas (*socio-centrism*). Turbulensi dan perbenturan nilai-nilai harus dilihat dan diarahkan sebagai cara untuk menciptakan iklim demokrasi dan budaya yang lebih produktif di masa depan -*the culture of chaos*.

Kalau tawaran solusi ini gagal, kita layak lebih cemas lagi sebab seperti yang diabstraksikan oleh Francis Fukuyama, bukan mustahil Indonesia akan memasuki sebuah fase pasca dis-integrasi yaitu fase *dis-solution*. Fase ini adalah fase kehancuran dimana apapun solusi yang ditawarkan tidak akan mampu mengintegrasikan kembali Indonesia secara utuh. Akhirnya yang terjadi adalah *dis-solution* (perpecahan) semakin kita ingin bersatu yang terjadi justru sebaliknya semakin tercerai berai. Negara-negara seperti Uni Soviet, Yugoslavia telah mengalami fase ini, dan tercatat oleh sejarah sebagai negara yang pernah bersatu tapi kini bubar. Apakah Indonesia akan demikian? Mudah-mudahan kita mampu memutus fase disintegrasi menjadi bertahan pada fase integrasi yaitu persatuan dan kesatuan bangsa.

Penutup

Kegagalan pemulihan di bidang ekonomi, politik, sosial adalah puncak gunung es yang menyembul di atas permukaan laut, sedang yang lebih substansial adalah rusaknya kehidupan bermasyarakat atau bersama. Maka kita kembalilah kepada masalah yang mendasar ini, yaitu mencari jawab tentang

bagaimana kehidupan bersama yang bermakna itu dapat dibungun kembali.

Francis Fukuyama adalah benar ketika Fukuyama mengatakan bahwa untuk membangun kehidupan bermasyarakat, perlu mempunyai modal yang disebut sebagai *social capital*.¹⁶ Mengikuti sosiolog James Coleman, Fukuyama mendeskripsikan modal sosial tersebut sebagai "*the ability of people to work together for common purposes in groups and organization*", singkatnya dapat bekerja bersama menghadapi sekalian permasalahan.

Kemampuan untuk dapat bekerja bersama-sama hanya akan muncul berdasarkan saling kepercayaan, yaitu manakala terdapat saling percaya antara sekalian komponen dalam masyarakat. Penulis sepakat dengan Fukuyama, manakala Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan itulah yang menjadi *social capital* utama membangun kembali kehidupan bermasyarakat kita saat ini yang amburadul.

Ini berarti, bahwa tanpa kepercayaan satu sama lain, suatu masyarakat akan gagal untuk benar-benar dapat disebut suatu kehidupan bersama. Indonesia justru ada pada titik dimana *social capital* itu makin menipis. Wacana yang dikembangkan Fukuyama sangat bermanfaat disaat kita mencari cermin untuk melihat wajah bangsa kita.

Istilah Fukuyama juga sangat pas menggambarkan keadaan bangsa Indonesia dewasa ini, ketika berbicara tentang bangsa-bangsa yang mengalami *great dis-*

¹⁶Francis Fukuyama. 1999. *The Great Disruption*, Farear, Straus and Giroux, New York.

ruption, guncangan yang hebat. Memang *great disruption* itu dipakai untuk memotret guncangan-guncangan di dunia sebagai akibat dari peralihan (transisi) suatu fase ke fase (zaman ke zaman) lain, seperti dari pra-industri ke masa industri. Tetapi analisisnya secara umum dapat diterapkan untuk melukiskan guncangan yang sedang dihadapi bangsa ini.

Akhirnya, harus disadari kalau merujuk pada teori Francis Fukuyama bahwa bangsa Indonesia telah memasuki fase disintegrasi yang cukup mengkhawatirkan. Sebelum berikutnya yaitu fase dis-solution benar-benar menghantam bangsa Indonesia. Saatnya fase ini dipotong sehingga dapat kembali ke posisi bangsa yang utuh. Kuncinya seperti telah diuraikan di atas mengarahkan turbulensi negatif ke arah turbulensi positif. Dan yang lebih penting saat ini, kita harus bersegera membangun kembali kehidupan bersama sebagai *social capital* yaitu kepercayaan atau saling mempercayai.

The last but not least nampaknya para elit politik dan berbagai komponen bangsa ini seperti kalangan akademisi, rohaniawan, LSM, dan lain-lain layak berdialog dan secara tulus ikhlas duduk bersama membicarakan masa depan bangsa ini. Sekali lagi framenya adalah membangun kembali *social capital*.●

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain*, Insist dan Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Our Posthuman Future, Qonsequences of the Bio-technology Revolution*, New York, Farear, Straus and Giroux.
- Fukuyama, Francis. 1999. *The Great Disruption*, Farear, Straus and Giroux, New York.
- Gould, Carol C.,1978. *Rethinking Democracy*, Cambridge :MIT Press.
- Henderson, Hezel, 1991. *Paradigma in Progress: Life Beyond Economics*.
- Huntington,SP. 2001. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Qalam, Yogyakarta.
- Macaulay, Stewart. 1983. *An Empirical View of Contract Wisconsin Law Review*.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Politik Hukum di Indonesia*, LP 3 ES dan UII Press.
- Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State and Utopis*, New York:Basic Books.
- Rawl, John. 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.

